

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bencana alam berupa banjir sering terjadi di Indonesia. Hal ini mengacu pada data statistik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2022), di mana banjir terjadi sebanyak 1.531 kejadian sepanjang tahun 2022. Banjir tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti: faktor meteorologi, topografi, penggunaan lahan, dan tipe tanah (Kharimah et al., 2021). Bencana banjir memiliki beragam resiko yang memberikan dampak negatife pada berbagai sektor. Bencana banjir ini dapat menyebabkan kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan tersebut dapat diukur dari segi kerusakan langsung seperti: hilangnya nyawa, cedera, kehancuran infrastruktur, kendaraan dan kerusakan tanaman dan hewan. Kemudian kerusakan tidak langsung mengacu pada gangguan sosial, trauma psikologis dan pola produksi dan konsumsi barang yang terganggu. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan pada bencana banjir.

Kota Semarang adalah salah satu daerah yang sering mengalami bencana banjir. Adapun wilayah yang sering mengalami banjir di Kota Semarang, yaitu seperti: daerah Muktiharjo kidul, Tambakrejo, Mangkang wetan, Mangunharjo, Wonosari, Tanjungmas, dan sebagainya. Menurut data dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, bencana banjir terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Data Bencana Banjir di Kota Semarang Tahun 2015-2022

No.	Tahun	Jumlah Kejadian
1.	2015	48
2.	2016	30
3.	2017	36
4.	2018	34
5.	2019	18
6.	2020	23
7.	2021	88
8.	2022	63

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa banjir terjadi setiap tahunnya di Kota Semarang. Banjir tersebut masih terus berlanjut hingga Maret 2023, dengan total 18 kejadian bencana banjir di Kota Semarang. Kemudian banjir di Kota Semarang juga disebabkan oleh permasalahan sistem drainase yaitu ketika saluran dipenuhi oleh tanaman liar, sampah, dan sedimentasi. Hal tersebut dapat menyebabkan penyumbatan dan membuat air meluap, sehingga menimbulkan banjir. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, masih terdapat 101 saluran drainase yang bermasalah, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2. Data Saluran Drainase

Saluran Kondisi Buruk [101 Saluran]	10. Sub Sistem Kali Bulu (Sistem Semarang Tengah) [2 Saluran]
1. Bandara A. Yani (Sistem Semarang Barat) [0 Saluran]	11. Sub Sistem Kali Mangkang (Sistem Mangkang) [4 Saluran]
2. Sub Sistem Bandarharjo (Sistem Semarang Tengah) [18 Saluran]	12. Sub Sistem Kali Pedurangan (Sistem Semarang Timur) [3 Saluran]
3. Sub Sistem BKB (Sistem Semarang Tengah) [20 Saluran]	13. Sub Sistem Kali Semarang (Sistem Semarang Tengah) [2 Saluran]
4. Sub Sistem BKT (Sistem Semarang Timur) [4 Saluran]	14. Sub Sistem Kali Siangker (Sistem Semarang Barat) [15 Saluran]
5. Sub Sistem Kali Asin (Sistem Semarang Tengah) [14 Saluran]	15. Sub Sistem Kali Silandak (Sistem Semarang Barat) [6 Saluran]
6. Sub Sistem Kali Babon (Sistem Semarang Timur) [1 Saluran]	16. Sub Sistem Kali Sringin (Sistem Semarang Timur) [3 Saluran]
7. Sub Sistem Kali Banger (Sistem Semarang Tengah) [0 Saluran]	17. Sub Sistem Kali Tenggang (Sistem Semarang Timur) [0 Saluran]
8. Sub Sistem Kali Baru (Sistem Semarang Tengah) [1 Saluran]	18. Sub Sistem Kali Tugurejo (Sistem Semarang Barat) [4 Saluran]
9. Sub Sistem Kali Bringin (Sistem Mangkang) [4 Saluran]	19. Sub Sistem Simpang Lima (Sistem Semarang Tengah) [0 Saluran]

Sumber: DPU (2022)

Pemerintah menyadari urgensi kebijakan untuk penanggulangan banjir sebagai respon terhadap tingginya risiko banjir di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kemudian agar penanggulangan bencana berjalan secara terpadu dan terkoordinasi secara menyeluruh maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah juga ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Selain itu, penanggulangan bencana juga menjadi salah satu agenda dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan pemerintah Kota Semarang dalam program penanggulangan baik secara struktur dan non struktur.

Secara struktur, upaya penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah seperti: normalisasi banjir kanal timur dan barat, pemasangan polder, pembangunan waduk, dan peninggian jalan. Sedangkan upaya penanggulangan secara non struktural yang dilakukan pemerintah, yaitu: pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi di DAS, dan pengembangan *Early Warning System* (EWS). EWS merupakan sistem peringatan dini, sehingga banjir dapat diantisipasi (Kurniawati & Suwandono, 2015).

Namun, penelitian terdahulu tentang mitigasi bencana sesuai dengan Permendagri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana di Kota Semarang, menjelaskan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana banjir belum maksimal (Permanahadi, 2022). Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan dari 19 indikator mitigasi bencana, Kota Semarang baru menerapkan 52,6% atau 10 indikator. Kemudian (Mahardika, 2018) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Semarang mulai dari pra bencana, terjadinya bencana, dan pasca bencana masih memiliki kekurangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Syafri, 2018) ditemukan bahwa kualitas layanan BPBD masih belum maksimal, karena masih terdapat keluhan dari masyarakat. Selain itu, berdasarkan pengakuan salah satu warga Kelurahan Siwalan, menyebutkan bahwa saluran air di sekitar tempat tinggalnya terlalu sempit, sehingga air tidak semuanya bisa tertampung di saluran air (www.kompas.id, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem drainase belum cukup baik.

Bencana banjir memiliki permasalahan kompleks dan multidimensi, sehingga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan peran dan tanggung jawab masing-masing (Nur, 2022). Adapun *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan banjir di kota Semarang yaitu institusi pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun demikian, di Kota Semarang kesepahaman antar *stakeholders* belum ada. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Kemudian berdasarkan *preliminary research*, peneliti mendapatkan informasi dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Semarang bahwa penanggulangan bencana banjir belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar unit pelaksana, normalisasi sungai belum 100% dan anggaran yang terbatas.

Lembaga pemerintahan merupakan *leading* sektor yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, rencana, dan program untuk penanggulangan banjir (Masyhuri et al. 2021). Pemerintah juga harus tangguh sehingga mampu untuk mengelola setiap bencana yang mungkin terjadi. Selain itu, *leading* sektor memiliki tiga fungsi dalam penanggulangan bencana banjir, yaitu: fungsi koordinasi, pelaksana dan komando (Awalia, 2015). Leading sektor dalam penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian ditingkat daerah

menurut Heryati (2020) lembaga pemerintah non-departemen ini disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Berdasarkan *preliminary research* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, *stakeholders* dalam pelaksanaan penanggulangan banjir dilakukan oleh: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Setiap instansi memiliki kepentingan tersendiri sehingga sering terjadi benturan kepentingan, sulitnya komunikasi dan koordinasi. Hal tersebut menyebabkan belum adanya kesepahaman antar *stakeholders* untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana.

Selain *stakeholders* dari pemerintah terdapat *stakeholders* dari komunitas, yaitu Kelurahan Siaga Bencana (KSB). Kelurahan Siaga Bencana (KSB) meliputi 64 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Pelaksanaan KSB merupakan tanggung jawab masing-masing kecamatan, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hanya bertugas untuk mengawal program tersebut. Kelompok ini dapat dilibatkan dalam pengendalian banjir dengan berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat dan mampu mengorganisir sumber daya manusia untuk mengurangi kerentanan resiko bencana banjir. Namun, dalam pelaksanaannya KSB masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing kecamatan, seperti: kendala pada pendanaan dan kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Kelurahan Siaga Bencana (Zahirah Zahrah, 2017).

Penanggulangan banjir tidak terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses evakuasi dengan menjadi relawan atau memberikan masukan tentang kebutuhan pengendalian banjir lokal (Nur, 2022). Adapun relawan yang terdata pada tahun 2022 sebanyak 101 orang. Namun dalam penanggulangan bencana banjir, masyarakat juga menjadi salah satu penyebab banjir. Hal tersebut diakibatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (www.detik.com, 2023).

Dari sektor swasta juga dapat mendukung upaya pengendalian banjir dengan menyediakan sumber daya keuangan dan membantu proses rehabilitasi serta rekonstruksi daerah yang terkena bencana (Suleman et al., 2007). Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengendalian banjir dan mempromosikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan pengendalian banjir. Kegiatan tersebut diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dengan PT. Pertamina dengan menginisiasi pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (www.republika.com, 2022).

Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir. Hal ini guna memetakan kepentingan dan pemahaman dalam penanggulangan banjir, sehingga program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menganalisis bahwa masih terdapat kendala dalam hubungan antar *stakeholders* sehingga sekarang di kota Semarang. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini diharapkan dapat memetakan peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

1.2. Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat keluhan dari masyarakat dan permasalahan sistem drainase
2. Mitigasi bencana di Kota Semarang belum maksimal (Kota Semarang baru berhasil menerapkan 52,6% atau 10 indikator dari 19 indikator mitigasi bencana.
3. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang belum maksimal (masih terdapat keluhan masyarakat serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait penanggulangan bencana banjir)
4. Kurangnya peran *stakeholders* dalam melakukan koordinasi dari masing-masing unit pelaksana (BPBD, DPU, Distaru, BBWS, Kelurahan, dan Masyarakat) dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan banjir.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat telah melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana banjir. Adapun focus dari permasalahan ini yaitu:

1. Siapa saja *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam peran *stakeholders* pada penanggulangan banjir di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di kota Semarang.
2. Untuk menganalisis peran *stakeholders* yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di kota Semarang.
3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa dapat menambah wawasan, dan informasi mengenai peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Diharapkan penelitian ini juga dapat membantu dalam menganalisis peran pemerintah mengenai banjir, serta menjadi tolak ukur kebijakan di masa mendatang, mengingat ancaman banjir yang terus terjadi di wilayah Kota Semarang. Kemudian bagi civitas akademika, diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pustaka dalam melaksanakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini sendiri.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai kontribusi kepada pemerintah Kota Semarang, terutama pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang, dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang serta pihak-pihak yang terlibat lainnya. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan yang berkaitan dengan peran *stakeholders* pada penanggulangan banjir.

1.5. Kerangka Penelitian Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Nama Jurnal dan Tahun Penelitian)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muzakar Isa, Liana Mangifera	Analisis <i>Stakeholders</i> Dalam Pengurangan Risiko Banjir Di Kabupaten Klaten (Humaniora, Sosial, dan Agama, Tahun 2017)	Pendekatan <i>mixed method</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 14 stakeholders dalam pengurangan risiko banjir ini. Mereka memiliki 6 kepentingan yang berbeda beda, yaitu <i>income</i> , lingkungan, pembangunan daerah dan keselamatan jiwa. Dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Klaten, BPBD mempunyai peran sentral bersama dengan Kepala Desa setempat dan relawan (masyarakat). Sedangkan perguruan tinggi merupakan aktor yang mempunyai pengaruh paling rendah dalam pengurangan risiko banjir ini
2	Dio Mahardika, Endang Larasati	Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi Banjir di Kota Semarang (Journal of Public Policy and Management Review, Tahun 2018)	Metode kualitatif dengan tipe deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD Kota Semarang adalah mulai dari prabencana masih terdapat kekurangan yaitu belum terbentuknya rencana kontijensi, kemudian pada tahap terjadi bencana yaitu kekurangan logistik dan penanggulangan bencana. personil <i>emergency</i> , dan tahap terakhir pasca bencana masih terdapat kekurangan dimana bentuk rehabilitasi yang dilakukan BPBD masih ada yang kurang tepat sasaran.

3	Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuningsih	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Tahun 2020)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata halal pulau ini melibatkan pemangku kepentingan dengan konsep pentahelix yang terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Ada 38 pemangku kepentingan yang terlibat dan diklasifikasikan menjadi pemangku kepentingan primer, kunci dan sekunder. Peran pemangku kepentingan tercermin dalam peran pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Hubungan antar pemangku kepentingan dilihat dari bentuk dan kegiatannya. Nilai dan komunikasi merupakan faktor pendukung dalam pengembangan destinasi wisata halal, sedangkan kepercayaan dan kebijakan merupakan faktor penghambat.
4	Syahputra Adisanjaya Suleman, Nurliana Cipta Apsari	Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Manajemen Bencana Banjir (Prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Tahun 2017)	Kualitatif	Peran <i>stakeholders</i> dalam manajemen bencana banjir yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB dan lembaga swasta dan internasional telah diatur dalam peraturan pemerintah. Namun dapat dilihat dari tugas, fungsi dan perannya, bahwa BNPB/BPBD mempunyai peran yang secara langsung berwenang dalam penanganan bencana, khususnya pada mitigasi bencana banjir. Hal ini didasarkan pada pembentukan lembaga BNPB/BPBD sebagai pusat dalam penanggulangan bencana nasional dan daerah.
5	Fitri Handayani, Hardi Warsono	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat sekitar, dan pengusaha. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku

	Departemen Ilmu	di Kabupaten Rembang (Journal of Public Policy and Management Review, Tahun 2017)		kepentingan meliputi pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran pemangku kepentingan dalam pembangunan pariwisata lebih ditekankan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik. Faktor yang menghambat peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan wisata Pantai Karang Jahe adalah keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, kegiatan promosi, dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> . Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu menjalin kerjasama antara pengelola Pantai Karang Jahe dengan pemilik lahan, membangun kesadaran wisata melalui kelompok sadar wisata, dan memberdayakan warga desa untuk memanfaatkan sampah menjadi produk komersial, sanksi diatur di desa dalam hal pendirian usaha pariwisata, pembenahan website Dinbudparpora terkait kegiatan promosi objek wisata Pantai Karang Jahe, serta perlu dilakukannya kerjasama yang mengikat antara stakeholders pendukung melalui nota kesepakatan kerjasama.
6	Annisa Novita Sari , Adi Susilo , Edi Susilo	<i>The Role of Stakeholders in Flood Management: Study at Ponorogo, Indonesia (The International Journal of Engineering and Science, Tahun 2013)</i>	Kualitatif	Koordinator penanggulangan banjir adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah mengkoordinir seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan penanggulangan banjir yang terdiri dari prabencana, bencana dan pasca bencana. Prabencana merupakan tahapan penanggulangan banjir yang terdiri dari penanggulangan banjir dan dini berupa sistem peringatan. Pada fase bencana, para pemangku kepentingan berkolaborasi dalam tanggap darurat dan

				akan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan pada fase pasca bencana, Badan Penanggulangan Bencana akan mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait untuk merehabilitasi dan merekonstruksi rusaknya infrastruktur yang ada.
7	Tri Yuniningsih, Ida Hayu Dwimawanti, Dyah Lituhayu	<i>The Role of Actors in Tourism Development in Tanjungpinang City, Riau Islands Province (Jurnal Administrasi Publik, tahun 2023)</i>	Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 45 aktor yang terlibat. Aktor dibagi menjadi lima peran. Aktor yang berperan sebagai pembuat kebijakan, koordinator, dan akselerator menjalankan peran mereka dengan baik. Beberapa aktor yang belum berperan optimal adalah fasilitator dan aktor pelaksana.
8	Tri Mulyani Sunarharum	<i>Managing Jakarta's Flood Risk After Hyogo: Policy And Plan Analyses (Conference Paper, Tahun 2016)</i>	Kualitatif	Kebijakan dan rencana ditingkat nasional menjadi kerangka kerja untuk menerjemahkan paradigma baru tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Terlepas dari kerangka kebijakan yang kuat yang mendasari strategi pengelolaan resiko banjir, ada peluang untuk meningkatkan mekanisme kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan serta dalam pelaksanaan rencana untuk memperkuat ketahanan bencana Jakarta
9	Gusti Ayu Maharani Ismadwijayanthi, I Wayan Mertha, Luh Nyoman Tri Lilasari	<i>The Role of Stakeholders in The Development of Tourism Attraction at Mertasari Beach, Sanur (Journal of Applied Science in Tourism Destination, Tahun 2023)</i>	Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bendesa Adat Intaran, BUPDA Intaran, Taman Inspirasi Muntig Siokan dan Desa Pokdarwis Sanur Kauh dikategorikan sebagai stakeholders primer. Stakeholders sekunder terdiri dari PerbekelDesa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali dan Tribun Bali. Dinas Pariwisata Denpasar, dikategorikan sebagai pemangku kepentingan utama. Kemudian klasifikasi pemangku

				kepentingan berdasarkan perannya sebagai pembuat kebijakan adalah Bendesa Adat Intaran dan Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Bendesa Adat Intaran dan BUPDA Intaran juga bertindak sebagai koordinator, kemudian sebagai fasilitator adalah Taman Inspirasi Muntig Siokan, Perbekel Desa Sanur Kauh dan Dinas Pariwisata Denpasar. Taman Inspirasi Muntig Siokan dan BUPDA Intaran sebagai pelaksana dan kemudian sebagai akselerator adalah Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali, Pokdarwis Desa Sanur Kauh dan Tribun Bali.
10	Artiningsiha, Jawoto Sih Setyonob, Rizki Kirana Yuniartanti	<i>The challenges of disaster governance in an Indonesian multihazards city: a case of Semarang, Central Java (Social and Behavioral Sciences, Tahun 2016)</i>	Kualitatif	Hasil penelitian mengatakan bahwa masyarakat memiliki kapasitas yang paling tinggi dibandingkan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan multibencana Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang memenuhi semua tahapan (Phases Pre Disaster, Event, Post Disaster and Monitoring Evaluation)

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam mengkaji informasi yang masih relevan terhadap permasalahan penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Isa (2014) dan Suleman (2007) memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini terkait peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir. Namun, dalam penelitian Isa (2014) yang berjudul “Analisis *Stakeholders* dalam Pengurangan Risiko Banjir di Kabupaten Klaten” menggunakan metode pendekatan *mixed method*, yaitu perpaduan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan Suleman (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran *Stakeholders* dalam Manajemen Bencana Banjir” menggunakan desain penelitian kualitatif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destiana (2020) dan Handayani (2017) memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Di mana kedua penelitian tersebut membahas tentang pengembangan objek wisata. Namun, kedua penelitian tersebut menggunakan teori yang sama dalam menganalisis peranan *stakeholders*, yang meliputi: *Policy creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Selanjutnya penelitian Mahardika (2018) memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang penanggulangan resiko di Kota Semarang. Penelitian tersebut juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Sunarhanum (2016) dan Sari (2013) yang juga menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, namun memiliki lokus kejadian yang berbeda, yaitu penanggulangan banjir di daerah Jakarta dan Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2023) dan Ismadwijayanthi (2023) menggunakan teori peran *stakeholders* yang sama dengan penelitian ini, meliputi: Policy creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Kemudian penelitian tersebut juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun memiliki lokus yang berbeda dengan penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan penelitian Artiningsih (2016) diketahui bahwa penelitian tersebut juga memiliki lokus yang sama yaitu di Kota Semarang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang” berfokus pada peran *stakeholders* dalam upaya penanggulangan bencana banjir. Meskipun terdapat kesamaan metode dan teori dengan beberapa penelitian sebelumnya. Namun adanya unsur kebaruan dalam lokus penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan penelitian untuk masa yang akan datang.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban, (2014) administrasi publik merupakan suatu metode yang sumber daya dan *personel public* diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Kedua ahli ini juga menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu yang mengelola pengaruh publik dan mengimplementasikan tugas yang

diberikan. Dan sebagai disiplin ilmu, administrasi publik memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan publik dengan cara pemulihan atau peningkatan kualitas terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Administrasi publik juga diartikan sebagai koordinasi upaya individu dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, mencakup pekerjaan sehari-hari. Kemudian secara global dapat dimaknai sebagai proses yang melibatkan implementasi kebijakan pemerintah, keterampilan mengarahkan dan banyak teknik lainnya yang dapat memberikan arah dan tujuan pada upaya sejumlah orang (Syafiie, 2010).

Presepsi tentang administrasi public sangat bervariasi. Hal tersebut tergantung dari pandangan orang terhadap kata “administrasi publik” itu sendiri (Keban, 2014). Administrasi public dapat diartikan sebagai *administration of public* (administrasi dari publik), di mana pemerintah memiliki peran agen tugas yang berkuasa dan berinisiatif untuk mengatur dan mengambil keputusan untuk kebaikan masyarakat. Selanjutnya terdapat pandangan bahwa *administration for public* (administrasi untuk publik), di mana pemerintah lebih tanggap terhadap hal yang dibutuhkan masyarakat dan memahami cara terbaik dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian terdapat persepsi bahwa *administration by public* (administrasi oleh publik), di mana pemerintah dengan konsep pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hidupnya secara mandiri agar tidak tergantung secara terus-menerus kepada pemerintah. Adapun Nicholas Henry dalam (Kaban,

2014) menyebutkan bahwa terdapat beberapa paradigma tentang keberadaan Ilmu Administrasi Publik, yaitu:

1. Paradigma 1 (1900-1926), Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini dikembangkan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Paradigma ini menyebutkan bahwa politik harus memfokuskan atensinya kepada kebijakan. Sedangkan administrasi difokuskan kepada pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pemisahan politik dan administrasi ini dilambangkan dalam bentuk pemisahan badan legislative dan badan eksekutif. Maksud dari paradigma ini yaitu administrasi dilihat sebagai suatu yang bebas nilai dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dari birokrasi pemerintahan. Namun, dalam paradigma ini kurang dijelaskan mengenai focus atau metode yang dikembangkan dalam administrasi public.
2. Paradigma 2 (1927-1937), Prinsip-prinsip Administrasi. Paradigma ini dikembangkan oleh Willoughby, Gullick dan Urwick. Beliau mengemukakan tentang prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi public. Prinsip tersebut dikenal dengan sebutan POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*). Prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja, termasuk organisasi pemerintah.
3. Paradigma (1950-1970), Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Beberapa ahli mempertanyakan paradigma-paradigma sebelumnya, di mana mereka beranggapan bahwa pemisahan politik dan administrasi merupakan tindakan

tidak realistis, serta prinsip administrasi tidak berlaku secara universal. Sehingga muncul pandangan baru di mana administrasi public sebagai ilmu politik dengan lokus birokrasi pemerintahan dan focus menjadi kabur karena prinsip administrasi memiliki banyak kelemahan. Periode ini menjadikan administrasi public mengalami krisis identitas, karena ilmu politik yang disiplin dianggap dominan dalam administrasi publik.

4. Paradigma 4 (1956-1970), Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Fokus dari paradigma ini yaitu mengembangkan prinsip-prinsip manajemen sebelumnya secara ilmiah dan mendalam. Namun perkembangan paradigma ini terbagi mejadi dua arah, yaitu: perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan mengarah kepada kebijakan publik.
5. Paradigma 5 (1970-1990), Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Adapun fokus dari paradigma ini yaitu teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya yaitu masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan public.
6. Paradigma 6 (1990-sekarang). Administrasi sebagai *Governance*. G. Shabbir Cheema dalam (Keban, 2014) menyebutkan bahwa sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana unsur-unsur ekonomi, sosial, dan politik dikelola berdasarkan interaksi antara masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. Paradigma administrasi sebagai *governance* mengacu pada lokus administrasi

publik yaitu bagaimana dan mengapa organisasi tersebut bekerja, berperilaku dalam organisasi, dan keputusan tersebut diambil (Mariana, 2010).

Administrasi sebagai *governance* dilakukan oleh para *stakeholders* pada proses perumusan dan pelaksanaan dalam mencapai tujuan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Banjir di Kota Semarang”, di mana pada penanggulangan banjir juga melibatkan banyak aktor. Tidak hanya pemerintahan tetapi juga melibatkan swasta dan masyarakat. Kemudian *good governance* dalam penanggulangan banjir dapat dilakukan dengan adanya hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara *stakeholders*. Pada proses penanggulangan bencana banjir, pemerintah mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat dengan maksud dan tujuan untuk dapat memecahkan masalah publik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masalah dapat timbul dalam berbagai macam, variasi dan intensitasnya. Sehingga, tidak semua isu publik dapat melahirkan kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat membuat orang berpikir, dan menemukan solusi yang dapat menciptakan kebijakan publik. Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan publik merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Namun, dalam proses kebijakan

publik juga perlu diperhatikan siapa yang berwenang merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Widodo (2018), ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup banyak bidang atau bidang pembangunan, seperti: kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dll. Selanjutnya, dari prespektif hierarki, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional atau lokal, misalnya Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya kebijakan publik didefinisikan oleh James E. Anderson dalam (Subarsono, 2015) yang menyebutkan bahwa kebijakan diputuskan oleh badan atau aparat pemerintah. Meskipun diakui bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh aktor dan faktor di luar pemerintah. Kemudian David Easton juga mengemukakan pendapatnya bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, maka pemerintah juga memberikan nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai.

Thomas Dye dalam (Subarsono, 2015) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Konsepnya sangat luas karena kebijakan publik mencakup apa yang dilakukannya. ketika menghadapi suatu masalah publik. Misalnya, ketika pemerintah menemukan jalan yang rusak dan tidak mengusulkan untuk memperbaikinya, maka pemerintah sudah memiliki kebijakan. Defenisi Thomas Dye tentang kebijakan publik menyiratkan bahwa kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah, bukan badan swasta. Kemudian kebijakan publik menjadi pilihan yang harus atau tidak

harus dibuat oleh lembaga pemerintah. Pilihan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status *quo*, seperti tidak membayar pajak merupakan sebuah kebijakan publik.

Thomas Dye dalam (Widodo, 2018) mengemukakan pendapatnya tentang proses kebijakan publik yang meliputi:

1. Mengidentifikasi Masalah Kebijakan: Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan(*demands*) tindakan pemerintah.
2. Penyusunan Agenda: merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada aparat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan kebijakan: merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan kebijakan: melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
5. Implementasi kebijakan: dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi
6. Evaluasi kebijakan: dilakukan oleh lembaga pemerintah.

Permasalahan tentang kebencanaan direspon pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Menurut Shalih (2021) kerangka kebijakan tersebut merupakan suatu kerangka kerja dan serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mengidentifikasi, mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari dampak bencana alam atau buatan manusia. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi nyawa manusia, harta benda, lingkungan, dan ekonomi masyarakat dari kerusakan yang disebabkan oleh bencana.

Handmer (2007) memaparkan pemahamannya tentang keterkaitan antara kebijakan dan respon kelembagaan terhadap keadaan darurat (bencana):

1. *Problem framing*. Dalam pembedahan masalah, semua *stakeholders* dapat terlibat di dalamnya. Namun, pembedahan masalah lebih baik dilakukan dengan memasukkan: perdebatan sosial dan wacana yang sedang berlangsung antar bagian masyarakat, identifikasi penyebab dari kerentanan dan ketahanan, dan penilaian resiko secara terbuka.
2. *Policy framing and strategic policy choice*. Tujuan kebijakan di bidang bencana harus secara eksplisit mengatasi konflik yang ada. Poin krusial dalam proses kebijakan yaitu menentukan apa dan siapa yang diikutsertakan dan dikecualikan.
3. *Policy design and implementation*. Tujuan kebijakan melibatkan beberapa instrument seperti: keuangan, informasi, manusia,

administrasi, undang-undang, dll. Kemudian diperlukan mekanisme untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau evaluasi.

4. *Policy monitoring and learning*. Tahap ini melibatkan observasi berkelanjutan dan pengumpulan data yang diperlukan secara rutin. Kaitan antara tahap 1 (pemantauan sistem manusia dan alam) memerlukan integrasi kebijakan dan pemantauan dasar yang memungkinkan pemisahan dampak dari intervensi kebijakan.

Kebijakan bencana adalah komitmen pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan mempersiapkan diri terhadap ancaman bencana. Tujuannya bukan hanya untuk merespons bencana saat terjadi, tetapi juga untuk mengurangi risiko bencana di masa depan dan membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana. Kebijakan bencana yang efektif adalah salah satu langkah kunci dalam menjaga ketahanan masyarakat dan lingkungan.

1.5.4 Analisis Peran Stakeholders

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) menurut Lattimoree dalam Putri (2018) adalah individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan suatu kebijakan yang mempengaruhi proses pencapaian suatu tujuan dalam organisasi. *Stakeholders* yang terlibat dapat mencakup individu ataupun kelompok yang terkena dampak seperti otoritas pemerintah nasional atau lokal,

politisi, pemimpin agama, organisasi dan kelompok masyarakat sipil dengan minat khusus, komunitas akademis, atau bisnis lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Durham et al. (2014) yang menyebutkan bahwa *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penelitian. Definisi ini mencakup siapa saja, atau kelompok apa pun, yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu kegiatan dan mungkin memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif.

Analisis peran *stakeholders* dalam studi kebijakan dilaksanakan untuk menunjukkan peranan dari para aktor atau pemangku kepentingan yang terlibat (Hidayah et al., 2019). Adapun peran menurut David Adi Susilo (2019) yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana mereka memiliki posisi dalam status sosial. Kemudian peran juga mencakup beberapa syarat, yaitu: norma yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, tindakan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, dan hubungan yang teratur akibat suatu jabatan. Selain itu, *stakeholders* mempunyai karakteristik yang dapat mempengaruhi proses kebijakan. Sehingga Handayani and Warsono dalam (Talib, 2020) mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 3 bagian, yaitu:

1. *Stakeholders* utama (Primer): merupakan *stakeholders* yang terkena dampak secara langsung, baik positif maupun negatif dari suatu rencana serta mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tersebut.

2. *Stakeholders* kunci: *stakeholders* yang berpengaruh kuat dan mempunyai kewenangan terhadap kelancaran kegiatan, serta memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada pembuatan kebijakan.
3. *Stakeholders* sekunder: *stakeholders* yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung dapat dijadikan fasilitator dalam proses pengembangan dan cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan kebijakan dikelompokkan oleh Nugroho dalam (Setiawan et al., 2018) menjadi 5 bagian yaitu:

- a. *Policy Creator*, yaitu *stakeholders* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
- b. Koordinator, yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat. Menurut (Destiana, 2020) Koordinator dituntut memiliki indikasi, yaitu:
 - a) *Having a global picture*, yaitu kemampuan untuk memahami visi jangka panjang dari semua elemen yang dipimpinnya.
 - b) *Setting a common goal*, yaitu kemampuan untuk memilih elemen yang dapat dijadikan sebagai roda penggerak utama sehingga dapat memicu pergerakan lainnya.

- c) *Knowing your team and defining team roles*, yaitu kemampuan untuk memahami kekuatan spesifik dari masing-masing elemen di dalam menjalankan tugasnya.
 - d) *Planning*, yaitu kemampuan menyusun tugas pokok dan fungsi elemen secara lengkap agar alokasi waktu, biaya dan target capaian dapat ditinjau ulang secara berkala
 - e) *Communicating and disseminating*, yaitu penyebaran informasi berupa program yang sudah disusun menjadi suatu aksi yang dapat dilakukan oleh semua *stakeholders*
 - f) *Review and controlling*, yaitu mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Fasilitator, yaitu *stakeholders* sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran. Fasilitator memiliki dukungan anggaran sehingga pengembangan sarana dan prasarana penanggulangan banjir dapat berjalan dengan baik.
- d. Implementor, yaitu *stakeholders* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- e. Akselerator, yaitu *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penelitian memberikan dampak positif, seperti: mendapatkan akses ke informasi atau sumber daya tambahan, dan meningkatkan relevansi atau kegunaan penelitian bagi pengguna dan penerima manfaat. Dengan melibatkan para pemangku kepentingan, hasil penelitian dapat disesuaikan secara lebih efektif dengan konteks lokal, meningkatkan kemungkinan bahwa hasil tersebut diadopsi dan diterapkan, dan menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi semuanya. Dalam penelitian mengenai Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang, penulis menemukan informasi dari *preliminary research* bahwa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir yaitu BPBD, Disperkim, DPU, dan BBWS. Namun, tidak semua pemangku kepentingan dalam kelompok akan berbagi kekhawatiran atau memiliki pendapat atau prioritas yang sama.

1.5.5 Penanggulangan Bencana

Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian kejadian yang ditimbulkan oleh faktor alam atau faktor nonalam sehingga dapat mengancam serta mengganggu kehidupan masyarakat. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat (Carter, 2008) di mana bencana adalah suatu peristiwa alam atau buatan manusia yang terjadi secara tiba-tiba atau progresif yang berdampak pada manusia. Sehingga masyarakat perlu mengambil langkah penanggulangan terhadap dampak tersebut. Penanggulangan tersebut melibatkan banyak pihak yang harus bekerja sama untuk mencegah,

memitigasi, mempersiapkan, merespon, dari dampak bencana. Carter dalam penelitiannya juga mendefinisikan penanggulangan bencana sebagai ilmu terapan yang melakukan pengamatan dan analisis bencana secara sistematis, untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana pada manusia, hewan, lingkungan, dan harta benda. Adapun tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (2017), yaitu:

1. Tahap pra-bencana yang dilakukan ketika tidak ada bencana namun ada kemungkinan terjadinya.
2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan saat bencana sedang berlangsung.
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadinya bencana.

Dalam semua tahapan penanggulangan bencana tersebut, terdapat tiga jenis manajemen yang digunakan, yaitu:

a. Manajemen Resiko Bencana.

Manajemen resiko bencana merupakan pengelolaan bencana yang berfokus pada upaya mengurangi risiko sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini diimplementasikan dalam bentuk.

- a) Pencegahan (*Prevention*): yaitu kegiatan untuk mencegah terjadinya bencana yang mempunyai dampak berbahaya pada masyarakat.

Pencegahan dapat dilakukan dengan membuat bendungan atau tanggul untuk mengendalikan arus banjir.

- b) Mitigasi (*Mitigation*): yaitu kegiatan untuk mengurangi dampak dari bencana seperti banjir. Mitigasi memiliki beberapa langkah seperti untuk mengenali resiko, kesadaran akan bencana resiko, dan perencanaan penanggulangan.
- c) Kesiapsiagaan (*Preparedness*): yaitu kegiatan yang diharapkan agar pemerintah, masyarakat, dan individu dapat menanggapi bencana secara cepat dan efektif. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan kesiapsiagaan, seperti: merumuskan perencanaan penanggulangan bencana, memelihara persediaan sumber daya, dan pelatihan personil.

b. Manajemen Kedaruratan

Manajemen kedaruratan merupakan pengaturan upaya penanganan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan kerugian dan korban serta penanganan pengungsi selama bencana berlangsung. Adapun fase-fase yang ditetapkan, yaitu:

- a) Tanggap darurat bencana: merupakan rangkaian tindakan yang segera dilakukan ketika terjadi bencana untuk mengatasi dampak negatifnya, termasuk tindakan penyelamatan dan evakuasi orang dan harta benda, memenuhi kebutuhan dasar, memberikan perlindungan, mengurus pengungsi, menyelamatkan, serta memulihkan infrastruktur dan fasilitas.

c. Manajemen Pemulihan

Manajemen pemulihan merupakan pengaturan upaya pemulihan bencana yang menekankan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana. Pemulihan ini dilakukan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyeluruh mengaktifkan kembali lembaga-lembaga, infrastruktur, dan fasilitas setelah terjadinya bencana, dengan fase-fase yang telah ditentukan, yaitu:

- a) Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua sektor pelayanan publik atau masyarakat hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah tertentu, dengan tujuan utama mengembalikan atau menjalankan secara normal semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah setelah bencana.
- b) Rekonstruksi, pada semua infrastruktur dan fasilitas, serta lembaga-lembaga di wilayah pasca bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan tujuan utama mendukung pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, menerapkan hukum dan ketertiban, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan bersama di wilayah pasca bencana.

Bencana berupa banjir memerlukan penanggulangan guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Agar penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik

maka dibutuhkan manajemen bencana. Manajemen bencana menurut (Suleman, 2007) merupakan ilmu tentang kebencanaan dan segala aspek terkait dengan bencana, khususnya resiko bencana dan pencegahan resiko bencana. Kemudian menurut William Nick Carter dalam (Suleman, 2007) disebutkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan beberapa tahapan, yaitu: persiapan, penanganan, perbaikan akibat kerusakan, evakuasi sarana dan prasarana sosial yang rusak. Selain itu tahapan manajemen bencana juga disampaikan oleh Nurjanah dalam (Suleman, 2007) yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Tahapan-tahapan tersebut memiliki prinsip praktis, diantaranya yaitu: Cepat dan tepat, Prioritas, Koordinasi dan keterpaduan, Berdayaguna dan berhasil guna, Transparansi dan akuntabilitas, Kemitraan, Pemberdayaan, Non diskriminatif, Non-Proselitasi.

1.5.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Stakeholders

Analisis peran *stakeholders* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Dalam penelitian Destiana, dkk (2020) menyebutkan bahwa terdapat 4 unsur yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pada peran *stakeholders*, yaitu:

- a. Nilai: Nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu harga sesuatu, angka kedalaman, kadar mutu, dan banyak sedikitnya isi. Nilai dapat dijadikan sebagai sebuah prinsip atau standar terhadap kualitas yang dianggap berharga. Menurut Schwartz dalam (Dahriyanto, 2018) nilai merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh individu dengan tingkat

kepentingan yang berbeda-beda, serta menjadi prinsip panutan dalam entitas sosial.

Analisis peran *stakeholders* memiliki beberapa nilai seperti: nilai individual, organisasi, legalitas, dan profesionalitas. Nilai individual dilihat dari peran kepemimpinan sebagai penggerak dalam penanggulangan banjir. Kemudian nilai organisasi dilihat dari landasan masing-masing institusi. Selanjutnya legalitas, di mana menilai peningkatan penanggulangan banjir berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Terakhir yaitu nilai profesionalitas dilihat dari kemampuan dan komitmen individu yang melaksanakan kebijakan terkait penanggulangan banjir.

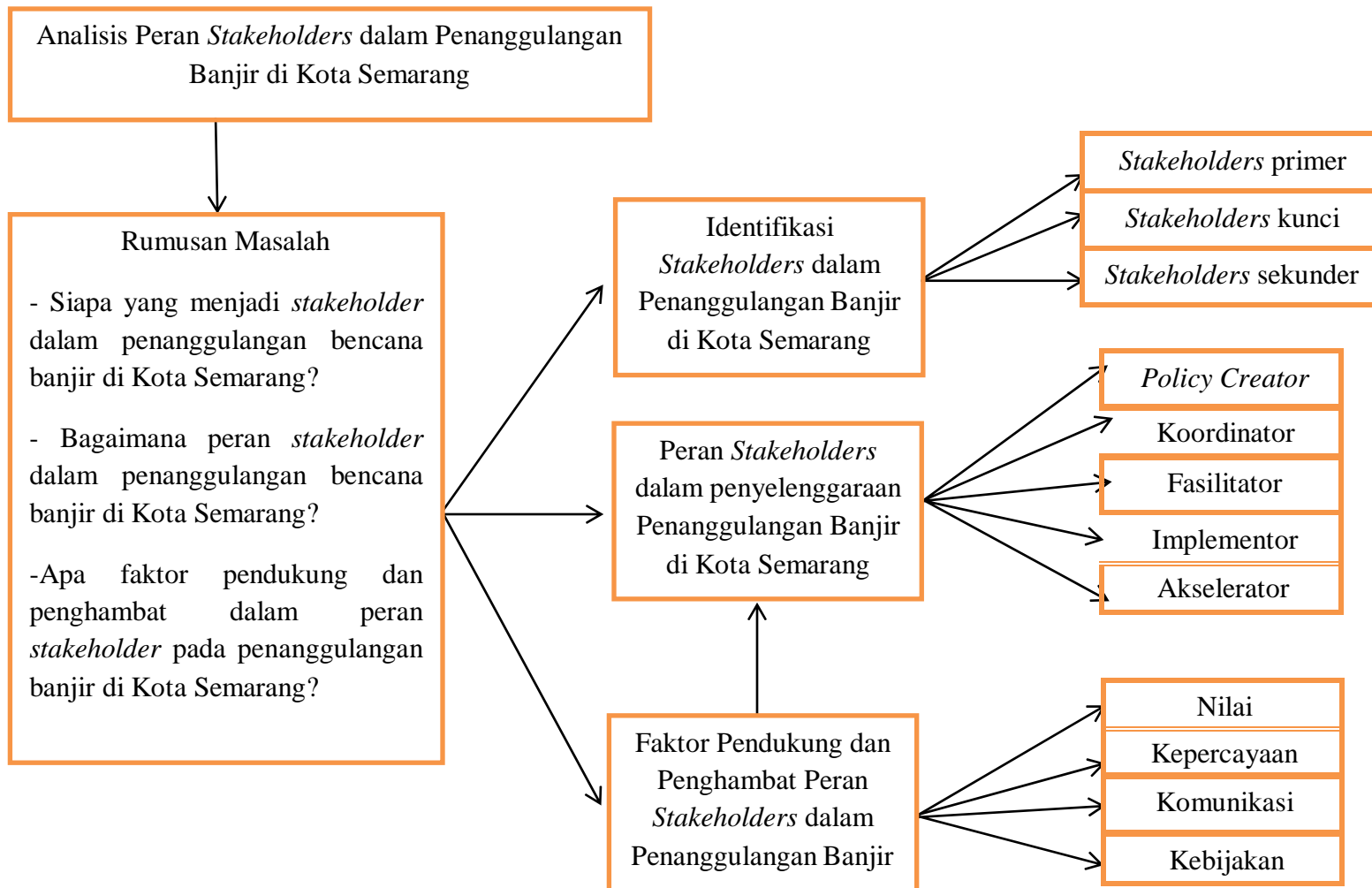
- b. Komunikasi: Hubungan antar *stakeholders* dapat berjalan secara efektif karena didukung oleh komunikasi yang baik (Destiana, 2020). Harold Lasswell menyebutkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yaitu: pengirim pesan, pesan, media, penerima pesan, dan efek atau umpan balik. Sehingga berdasarkan unsur tersebut komunikasi juga diartikan sebagai proses penyampaian pesan oleh pengirim pesan melalui media tertentu kepada penerima pesan. Komunikasi yang efektif di mana *stakeholders* secara aktif terlibat, dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dan mengatasi konflik, serta dapat membentuk hubungan yang baik.

c. Kepercayaan: Menurut Colquitt, LePine dan Wesson dalam (Qomariah, 2014) kepercayaan adalah keinginan untuk menggantungkan diri pada suatu otoritas yang didasarkan pada pengharapan positif akan tindakan dan perhatian otoritas. Kemudian George dan Jones dalam (Qomariah, 2014) juga menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan ungkapan keyakinan terhadap orang lain atau kelompok, sehingga tidak akan berisiko untuk dihancurkan atau dilukai oleh tindakan mereka. Namun, hubungan yang terjalin antar *stakeholders* memiliki peluang munculnya rasa kurang percaya di antara *stakeholders*. Hal tersebut dapat muncul karena kurangnya koordinasi dan sinergi, serta arahan dari sektor utama dalam upaya penanggulangan banjir. Oleh karena itu, menurut (Qomariah, 2014) dalam membangun kepercayaan dibutuhkan yaitu:

1. Integritas, yaitu mengacu pada kejujuran dan kebenaran
2. Kompetensi, yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal yang dimiliki individu.
3. Konsistensi, yaitu berhubungan dengan keandalan, kemampuan memprediksi dan penilaian individu dalam menangani situasi.
4. Loyalitas, yaitu keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain.
5. Keterbukaan, yaitu memberikan kemudahan kepada setiap orang dalam mengakses informasi.

d. Kebijakan: Kebijakan merupakan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan (Keban, 2014). Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan sebagai landasan dalam penanggulangan banjir. Dalam penanggulangan bencana, pemerintah membuat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

1.5.7 Kerangka Berpikir



1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep merupakan batasan atau rincian kegiatan operasional yang diperlukan untuk menyesuaikan variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala yang memberi arti pada variabel tersebut. Operasionalisasi dalam penelitian ini tidak terlepas dari analisis peran *stakeholders* untuk membantu menganalisis peran antar aktor. Untuk menghindari salah tafsir istilah yang digunakan dan untuk kemudahan pemahaman, beberapa konsep telah dioperasionalkan.

1. Identifikasi *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.
 - a) *Stakeholders* primer memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdampak secara langsung dari kegiatan tersebut.
 - b. Memiliki kepentingan dalam tahapan-tahapan kegiatan.
 - b) *Stakeholders* kunci memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki kewenangan terhadap kelancaran kegiatan
 - b. Memiliki kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan
 - c) *Stakeholders* sekunder memiliki kriteria yaitu sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepedulian besar terhadap proses kegiatan
 - b. Menjadi fasilitator dalam proses kegiatan.

2. Peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

a) *Policy Creator*

Stakeholders sebagai *policy creator* yaitu bertugas sebagai pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan. Dalam penelitian ini *policy creator* dilihat dari kriteria sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam penetapan kebijakan.
- b. Pengaruh dalam menetapkan keputusan.

b) Koordinator

Koordinator pada penanggulangan banjir perlu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan *stakeholders* lainnya. Menurut (Destiana, 2020) koordinator dituntut untuk memiliki kemampuan dengan kriteria:

- a. Keterlibatan dalam koordinasi.
- b. Pengaruh yang diberikan dalam koordinasi.

c) Fasilitator

Stakeholders sebagai fasilitator perlu menunjukkan keterlibatannya berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Fasilitator memiliki kriteria berupa:

- a. Kemampuan menyediakan fasilitas yang menunjang penanggulangan banjir.
- b. Kemampuan dalam memberdayakan sumber daya manusia.
- c. Kemampuan dalam melibatkan masyarakat pada upaya penanggulangan bencana banjir.

d) Implementator

Stakeholders sebagai implementator melaksanakan kegiatan penanggulangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kriteria *stakeholders* sebagai implementator yaitu:

- a. Kemampuan bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan.
- b. Melaksanakan penanggulangan banjir secara efektif dan efisien.

e) Akselerator

Adapun kriteria *stakeholders* sebagai accelerator yaitu:

- a. Bentuk kontribusi yang diberikan dalam percepatan suatu program.
- b. Kemampuan untuk memberikan dukungan atau inovasi.

3. Faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

1) Nilai

Nilai menjadi acuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Terdapat beberapa pertimbangan mengenai adanya nilai dalam suatu kegiatan, diantaranya yaitu:

- a. Pemahaman *stakeholders* terhadap nilai yang diterapkan
- b. Tingkat kepentingan nilai dari setiap *stakeholders*

2) Komunikasi

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu penunjang dalam hubungan kerjasama antar *stakeholders*. Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan kriteria, yaitu:

- a. Menyampaikan informasi secara bertahap dan mudah diakses
- b. Memiliki kesepahaman (sinergi) antar *stakeholders*
- c. Adanya pemahaman/kesadaran masyarakat

3) Kepercayaan

Tujuan penanggulangan banjir dapat dicapai dengan cara melibatkan komunikasi yang dapat membangun kepercayaan. Dalam membangun kepercayaan antar *stakeholders*, diperlukan kriteria menurut Robbins dan Judge dalam(Qomariah, 2014), yaitu:

- a. Integritas
- b. Kompetensi
- c. Konsistensi
- d. Loyalitas
- e. Keterbukaan

4) Kebijakan

Stakeholders bertindak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dalam penelitian Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Banjir, *stakeholders* berpedoman pada kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang.

1.7. Argumen penelitian

Penelitian Administrasi Publik merupakan sarana ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu, dan penggunaannya melibatkan seluruh proses penyelenggaraan dengan upaya kerjasama dua orang atau lebih atau upaya bersama untuk menggunakan semua sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian tujuan. Masalah utama administrasi yaitu menguasai, menghimpun, dan menggunakan unsur-unsur penelitian secara efektif dan efisien. Implementasi administrasi sendiri memiliki landasan kegiatan yang berpedoman pada empat prinsip, yaitu: fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas, orientasi tujuan dan kontinuitas. Masalah dalam Administrasi Publik tentunya berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut orang banyak atau publik sehingga bisa digolongkan kedalam manajemen ataupun kebijakan publik.

Pada penelitian “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Semarang” dapat diidentifikasi sebagai riset Administrasi Publik karena pada penelitian ini, terdapat permasalahan publik yaitu bencana banjir yang memberikan dampak negatif pada kelangsungan hidup masyarakat terutama bagi yang terdampak bencana. Adapun kebijakan yang diimplementasikan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maupun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang. Selain itu, keterlibatan *stakeholders* juga tidak dapat menghentikan terjadinya banjir di Kota Semarang. Oleh

karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana peran *stakeholders* dalam implementasi penanggulangan banjir di kota Semarang dengan menggunakan analisis Nugroho (2014) yaitu: *Policy Creator*, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono dalam penelitian deskriptif (Pasolong, 2020) yaitu di mana suatu penelitian yang menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi ketika melakukan penelitian. Kemudian terdapat upaya menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sedang terjadi atau yang ada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keadaan saat ini dan untuk mengkonfirmasi hubungan antara variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, bersifat objektif dan hanya menjelaskan informasi. Sehingga dalam penelitian deskriptif, kata tanya “bagaimana” menjadi hal yang umum digunakan saat membuat teks pertanyaan penelitian.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta melakukan

analisa kekelurahan yang rawan mengalami banjir di Kota Semarang yaitu Kelurahan Tanjung Mas.

1.8.3 Subjek Penelitian

Berkaitan dengan isi penelitian, subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu unsur yang ada dalam populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sehingga dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik sampling bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik ini mengambil sampel yang digunakan dengan langsung menunjuk ke seseorang yang dianggap mewakili karakteristik populasi. Seperti subjek utama dalam penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, serta instansi-instransi terkait dan subjek pendukung penelitian seperti masyarakat yang terdampak bencana banjir. Berdasarkan *Preliminary Research* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, diketahui bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.3 Profil Informan

No.	Informan	Kriteria Informan
1.	Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	1. Menguasai atau memahami upaya penanggulangan bencana banjir.
2.	Sub <i>Coordinator</i> Sumber Daya Air dan Drainase Dinas	2. Terlibat langsung dalam upaya meminimalisir terjadinya bencana banjir

	Pekerjaan Umum Kota Semarang	di Kota Semarang. 3. Ketersediaan informan di lapangan.
3.	Pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	4. Merasakan dampak dari bencana banjir di Kota Semarang.
4.	Pegawai Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana	5. Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan bahasa sendiri.
5.	Lurah yang tergabung dalam Kelurahan Siaga Bencana (KSB)	
6.	Masyarakat Kota Semarang	

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

1.8.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini artinya nilai dari suatu perubahan yang tidak bisa dijelaskan dalam angka-angka. Kemudian jenis data yang mendukung penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Contoh data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan, yaitu dari orang yang menjadi subjek wawancara peneliti di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Kemudian penelitian ini juga didukung oleh data sekunder, di mana semua

data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan di Instansi, atau dari mana saja sudah diolah.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara dapat dilakukan secara langsung (personal interview) ataupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan wawancara langsung. Wawancara langsung adalah pembicaraan 2 arah yang dilakukan sang pewawancara (interviewer) terhadap responden atau informan. Hal ini guna untuk menggali informasi relevan menggunakan tujuan penelitian. Perbedaan wawancara ini dengan pembicaraan sehari-hari yaitu umumnya yang menjadi partisipan atau responden adalah orang asing yang belum dikenal sebelumnya, serta pembicaraan diarahkan oleh sang pewawancara. Adapun informan yang diwawancarai terkait dengan penelitian ini, yaitu: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Penataan Ruang (Distaru), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Kelurahan Siaga Bencana (KSB), dan masyarakat.

Partisipan diminta untuk memberikan informasi berupa fakta, opini, perilaku, dan lain-lain. Wawancara langsung dapat dilakukan secara informal atau formal

(terstruktur). Untuk wawancara secara informal, pewawancara hanya perlu mengingat pertanyaan kunci yang dipakai untuk mendapatkan informasi. Sedangkan pada wawancara formal, pewawancara berpedoman pada daftar pertanyaan (*interview guide*) yang sudah dipersiapkan. Adapun teknik wawancara langsung yang dapat diterapkan oleh pewawancara yaitu: menjaga momentum pengenalan, tepat waktu dalam melaksanakan wawancara, dan tidak bertele-tele dalam memberikan pertanyaan tentang penelitian. Wawancara pada analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang menggunakan teknik wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (*interview guide*).

2. Studi Pustaka

Studi pustaka atau studi literatur menurut Yaniawati (2020) merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengambil data dan informasi baik melalui dokumen, foto, gambar, dan dokumen lainnya yang dapat mendukung proses penelitian. Studi pustaka dapat mempengaruhi kreadibilitas hasil suatu penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi yang relevan dengan analisis peran *stakeholders* dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang.

Kegiatan studi pustaka mengandung uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer pada studi kepustakaan

didapatkan dari laporan penelitian dan hasil wawancara. Sedangkan sumber sekunder pada studi kepustakaan didapatkan dari: tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan yang tidak langsung disaksikan atau dialami oleh peneliti.

Tabel 1.4 Matriks Teknik Pengumpulan Data

Jenis Pengumpulan Data	Opsi-Opsi	Kelebihan	Kelemahan
Wawancara	Berhadapan secara langsung yaitu peneliti melakukan wawancara perorangan.	Partisipan bisa lebih leluasa memberikan informasi historis yang memungkinkan peneliti mengontrol alur tanya jawab.	- Informasi yang diperoleh bisa saja tidak murni karena masih disaring kembali oleh peneliti. - Tidak semua orang punya kemampuan artikulasi dan presepsi yang setara.
Studi Pustaka	Dokumentasi public, koran atau makalah.	-Menyajikan data yang berbobot. - Dapat diakses kapan saja. - Memungkinkan peneliti untuk memperoleh bahasa dan kata-kata teksual.	-Mengharuskan peneliti menggali informasi dari tempat-tempat yang mungkin sulit ditemukan. -Dokumen bisa saja diproteksi dan tidak memberikan akses privat maupun public. -Materi sangat mungkin tidak lengkap.

Sumber: Haryoko, dkk (2020)

1.8.6 Analisis dan Intrepetasi Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Maleong, 2021) menyatakan bahwa analisis data kualitatif merupakan usaha yang dilakukan saat bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mengklasifikasikan data ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan diputuskan. Sedangkan interprestasi data yaitu upaya yang dilakukan untuk memperoleh makna yang lebih dalam dan luas dari hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara menelaah secara kritis temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan serta informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.

Analisis data dibagi menjadi dua jenis yaitu analisis deskriptif dan analisis sebab akibat dan hubungan antar variabel. Analisis deskriptif berguna untuk menunjukkan kondisi atau letak suatu subjek pada waktu tertentu. Sedangkan analisis sebab akibat yaitu analisis yang meneliti bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini lebih didasarkan pada jenis analisis deskriptif yang mengkaji suatu variabel. Adapun langkah dalam menganalisis data kualitatif menurut Rijali (2018), yaitu:

1. Pengumpulan data

Hal ini berkaitan dengan teknik penggalian data serta sumber dan jenis data dalam penelitian kualitatif. Sumber utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Sedangkan sumber

tambahan merupakan sumber dari dokumen resmi, dokumen pribadi dan arsip (Maleong, 2021).

2. Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian ini melakukan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan. Adapun langkah dalam melakukan reduksi data, yaitu: meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

3. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk tersebut merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, dan proposisi. Kesimpulan ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis.

1.8.7 Kualitas Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik triangulasi data. Triangulasi dimaksudkan sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi fakta yang ada dalam konteks penelitian sekaligus mengumpulkan data kejadian dan hubungan yang berbeda dari berbagai

prespektif. Menurut Denzin dalam (Moleong, 2021) mengklasifikasikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan kedalam empat macam, yaitu: sumber, metode, penyidik dan teori.

Penelitian ini menggunakan pengujian validitas data dengan cara menganalisis sumber, sehingga peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Sumber berdasarkan metode perolehan data dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari metode wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip data. Kemudian dalam mencari kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber, wawancara dilakukan kepada lebih dari satu subjek sehingga menghasilkan bukti atau padangan yang berbeda terkait peran *stakeholders* dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

Tabel 1.5 Triangulasi Sumber

No.	Data	Sumber (informan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Tugas dan Fungsi dalam upaya penanggulangan bencana banjir.						
2.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai <i>policy creator</i> .						
3.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai coordinator.						
4.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai fasilitator.						
5.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai implementator.						
6.	Peran <i>stakeholders</i> sebagai akselerator.						
7.	Penerapan nilai dalam upaya penanggulangan banjir.						
8.	Penerapan kepercayaan antar <i>stakeholders</i> .						
9.	Pengaruh komunikasi pada penanggulangan banjir.						
10.	Kebijakan yang diterapkan pada penanggulangan bencana banjir.						

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)